

KOMUNIKASI POLITIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF ILMU KOMUNIKASI, ILMU POLITIK DAN KOMUNIKASI ISLAM

Erwin Jusuf Thaib¹

¹IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia, erwinjthaib@iaingorontalo.ac.id

Abstarct: This article discusses political communication from three perspectives, namely the perspective of communication science, political science, and Islamic communication. The study in this article was carried out by descriptive analysis with the relevant literacy study approach. The results of this study indicate that from the perspective of communication science, political communication is seen from two aspects, namely the mechanistic communication aspect which is based on the Lasswell's theory, namely communicators convey messages to certain audiences through a medium with certain effects. The second aspect is symbolic interaction that rests on Mead's theory which views that every politician or political group will put forward a distinctive attribute as a symbol of his or her identity in a positive communication process. In a political science perspective, political communication is a vehicle that can be used to communicate political messages whose ultimate goal is the attainment of power in its various dimensions. Political communication can be played by politicians who have the goal of gaining certain power, or it can be played by professionals in which they skillfully connect political interests with their target audiences. Political communication in the perspective of Islamic communication emphasizes ethical political communication practices. This communication model is built based on Hefni's theory which states that Islamic communication is a communication built on Islamic principles that have the spirit of peace, hospitality and safety. On this basis, the political communication model that is built is ethical political communication that is far from the practice of political communication which attacks and overthrows each other.

Keywords: Politic communication, communication, politic, islamic communication

Abstrak: Artikel ini membahas komunikasi politik ditinjau dari tiga perspektif yakni perspektif ilmu komunikasi, ilmu politik, dan komunikasi Islam. Kajian dalam artikel ini dilakukan dengan analisis deskriptif dengan pendekatan studi literasi yang relevan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa dari perspektif ilmu komunikasi, komunikasi politik dilihat dari dua aspek yakni aspek komunikasi mekanistik yang bertumpu pada teori Lasswell yakni komunikator menyampaikan pesan kepada khalayak tertentu melalui suatu media dengan efek tertentu. Aspek yang kedua adalah interaksi simbolik yang bersandar pada teori Mead yang berpandangan setiap politisi atau kelompok politik akan mengedepankan suatu atribut khas sebagai simbol identitas dirinya dalam sebuah proses komunikasi positif. Dalam perspektif ilmu politik, komunikasi politik adalah wahana yang bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan politik yang tujuan akhirnya adalah pencapaian kekuasaan dalam berbagai dimensinya. Komunikasi politik bisa diperankan oleh politisi yang memiliki tujuan untuk meraih kekuasaan tertentu, atau bisa juga diperankan oleh profesional di mana dia dengan keahliannya menghubungkan kepentingan politik dengan khalayak sasarannya. Komunikasi politik dalam perspektif komunikasi Islam menekankan pada praktek komunikasi politik yang beretika. Model komunikasi ini dibangun berdasarkan teori Hefni yang menyatakan bahwa komunikasi Islam adalah komunikasi yang dibangun di atas prinsip Islam yang memiliki ruh kedamaian, keramahan dan keselamatan. Dengan landasan ini, maka model komunikasi politik yang terbangun adalah komunikasi politik yang beretika yang jauh dari praktek komunikasi politik yang saling serang dan saling menjatuhkan.

Kata Kunci: Komunikasi Politik, Komunikasi, Politik, Komunikasi Islam

A. PENDAHULUAN

Salah satu aspek yang selalu berkaitan dengan kehidupan manusia di manapun dan kapanpun mereka eksis adalah masalah politik. Hal ini berkaitan dengan sebab bahwa politik menyangkut hajat hidup dan kepentingan manusia, baik secara individual maupun secara kolektif. Masalah politik adalah masalah yang selalu menyertai manusia karena berkaitan dengan upaya memenuhi segala tuntutan kehidupan manusia, sejak zaman Yunani Kuno yang ditandai dengan banyaknya pembahasan yang berkaitan dengan politik sebagaimana yang diungkapkan oleh Aristoteles, Plato, dan filosof lainnya, juga dalam dunia Islam sendiri, bahkan hingga zaman modern ini. bahkan dalam pandangan Harun Nasution, persoalan yang pertama kali timbul di dunia Islam menurut sejarah bukanlah persoalan tentang keyakinan tetapi masalah politik yang berkaitan dengan siapa yang menjadi suksesor Nabi Muhammad saw setelah beliau wafat.¹

Dalam konteks modernitas, politik menjadi salah satu ajang perwujudan kehidupan demokratis dari suatu negara. Sistem politik yang melibatkan seluruh elemen bangsa dan negara merupakan sebuah perwujudan demokrasi yang ideal. Demokrasi sebagai sebuah sistem telah dijadikan alternatif berbagai tatanan berbagai aktivitas bermasyarakat dan bernegara di banyak negara. Menurut Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. *Pertama*, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. *Kedua*, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.²

Demokrasi itu sendiri sebagai bagian dari pranata kehidupan masyarakat memang berperan penting bagi kehidupan masyarakat pada umumnya, terutama yang berkaitan dengan keputusan-keputusan politik. Joseph Schmitter berpendapat bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Sementara itu menurut Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggungjawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah politik oleh warga negara yang bertindak

¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1985) h. 88

² Dede Rosyada, et.al., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003) h. 109-110

secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan wakil mereka yang telah terpilih.³

Pendapat-pendapat di atas menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan publik, dalam sistem demokrasi terdapat beberapa institusi antara lain pemerintah dan institusi politik seperti parlemen sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang sistem keterwakilannya telah diatur secara politik pula. Kehadiran parlemen dengan berbagai bentuknya telah mewarnai kehidupan politik masyarakat modern. Dalam konteks Indonesia, parlemen mewujud dalam bentuk MPR, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten-Kota. Di Amerika Serikat berbentuk *Senat* dan *House of Representative*. Di negara-negara Islam di sebut *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdhi*. Semua model parlemen di atas pada umumnya hanya memiliki tiga fungsi utama yakni legislasi, *budgeting*, dan pengawasan.

Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, parlemen mengalami suatu dinamika internal antar sesama anggotanya. Karena perbedaan latar belakang basis politik dan ideologis, terkadang parlemen mengalami kebuntuan dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi hal ini bisa dijumpai dengan upaya pendekatan komunikasi antar elemen internal parlemen. Model komunikasi yang digunakan inilah yang disebut dengan komunikasi politik. Komunikasi politik memang menjadi solusi yang bijak untuk menjembatani perbedaan yang terjadi. Dengan proses ini, maka dinamika akan hidup kembali karena menghidupkan kembali komunikasi yang terputus, sehingga sebuah keputusan bisa dihasilkan.

Uraian di atas menggambarkan tentang pentingnya komunikasi politik untuk menghidupkan keseluruhan proses politik agar memperoleh keputusan yang bisa diterima semua pihak. Melihat posisi sentralnya dalam kehidupan politik, maka kajian komunikasi politik telah menjadi salah satu bentuk kajian yang serius di dunia akademik, baik itu ditinjau dari perspektif ilmu komunikasi, ilmu politik maupun ditinjau dari perspektif ilmu komunikasi Islam. Ketiga perspektif inilah yang akan dijadikan pokok bahasan dalam artikel ini.

³ Dede Rosyada, et.al., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, h. 111

B. KOMUNIKASI POLITIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF ILMU KOMUNIKASI

Komunikasi Politik (*political communication*) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara “yang memerintah” dan “yang diperintah”. Mengkomunikasikan politik tanpa aksi politik yang kongkret sebenarnya telah dilakukan oleh siapa saja: mahasiswa, dosen, tukang ojek, penjaga warung, dan seterusnya. Tak heran jika ada yang menjuluki komunikasi politik sebagai neologisme, yakni ilmu yang sebenarnya tak lebih dari istilah belaka.

Dalam praktiknya, komunikasi politik sangat kental dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, dalam aktivitas sehari-hari, tidak satu pun manusia tidak berkomunikasi, dan kadang-kadang sudah terjebak dalam analisis dan kajian komunikasi politik. Berbagai penilaian dan analisis orang awam berkomentar sosial kenaikan BBM, ini merupakan contoh kekentalan komunikasi politik. Sebab, sikap pemerintah untuk menaikkan BBM sudah melalui proses komunikasi politik dengan mendapat persetujuan DPR. Konsep, strategi, dan teknik kampanye, propaganda, dan opini publik termasuk dalam kajian bidang ilmu komunikasi politik.

Jika disimak secara seksama, fungsi komunikasi itu sangat banyak. Banyak peminat komunikasi atau ilmuwan komunikasi yang sudah memaparkan persepsinya tentang fungsi komunikasi, tetapi mereka belum mampu memuaskan semua pihak. Masih memungkinkan muncul persepsi lain tentang fungsi komunikasi.

Harold D. Lasswell, memaparkan bahwa fungsi komunikasi sebagai berikut:

1. Menjaga atau mengawasi lingkungan (*surveillance of the environment*);
2. Menghubungkan bagian-bagian yang terpisah dari masyarakat untuk lingkungannya (*correlation of the part of society in responding to the environment*); dan
3. Menurunkan warisan sosial dari generasi ke generasi berikutnya (*transmission of social heritage*).⁴

Menurutnya ada tiga kelompok yang selama ini melaksanakan ketiga fungsi tersebut.

⁴ Denis Mc Quail, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar* (Jakarta: Erlangga; 1994) h. 136-137

Fungsi pertama dijalankan oleh para diplomat, atase, dan koresponden luar negeri sebagai usaha menjaga lingkungan. Fungsi kedua lebih diperankan oleh para editor, wartawan, dan juru bicara sebagai penghubung, respon internal. Fungsi ketiga dilaksanakan oleh para pendidik dalam lingkungan pendidikan formal atau informal karena terlibat dalam mewariskan adat kebiasaan, nilai-nilai dari generasi ke generasi.

William I. Gorden⁵ mengungkapkan empat kerangka fungsi komunikasi, yaitu sebagai berikut; *Pertama*, komunikasi sosial. Dengan komunikasi, manusia dapat berhubungan sosial dengan sesama manusia lainnya dalam upaya memupuk silaturahmi, membangun aktualisasi diri, menanamkan citra diri, dan bekerja sama dalam berbagai bentuk kehidupan guna mempertahankan kelangsungan hidup.

Kedua, komunikasi ekspresif. Fungsi komunikasi ini berkaitan erat dengan komunikasi sosial. Dalam kehidupannya memupuk komunikasi sosial, manusia memiliki keinginan untuk mengungkapkan berbagai perasaan dirinya terhadap pihak lain, baik sebagai individu maupun kelompok. Berbagai perasaan manusia, seperti sayang, rindu, cinta, benci, peduli, simpati, sedih, takut, dan marah diungkapkan kepada manusia lain melalui berbagai bentuk pesan-pesan, baik verbal maupun nonverbal.

Ketiga, komunikasi ritual. Manusia hidup tidak dapat melepaskan diri dari sistem kehidupan yang sudah dibentuk sebelumnya. Prosedur-prosedur kehidupan yang nyaris sebagian sudah melekat menjadi sebuah keyakinan dan keharusan dilakukan oleh manusia dalam menjalani fase-fase kehidupan. Pengungkapan berbagai perasaan sebagaimana komunikasi ekspresif dalam konteks memenuhi prosedur sistem kehidupan yang sudah diyakini, seperti pelaksanaan upacara kelahiran, ulang tahun, pernikahan, sampai pada upacara kematian merupakan bagian dari fungsi komunikasi ritual.

Keempat, komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental lebih pada fungsi komunikasi untuk melakukan tindakan persuasif, yakni untuk membujuk orang atau pihak lain dengan berbagai penguatan informasi yang diberikan. Komunikasi ini bertujuan menginformasikan, mengajarkan, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan serta perilaku atau menggerakkan tindakan dan menghibur orang atau pihak lain.

⁵William J. Gorden, *Communication: Personal and Public* (Sherman Oaks California: Alfred, 1989) h. 137

Rudolph F. Verderber⁶ mengemukakan bahwa komunikasi mempunyai dua fungsi. *Pertama*, fungsi sosial, yakni untuk tujuan kesenangan, menunjukkan ikatan dengan orang lain, membangun dan memelihara hubungan. *Kedua*, fungsi pengambilan keputusan, yakni memutuskan untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu pada saat tertentu. Sebagian keputusan itu dibuat sendiri dan sebagian lagi dibuat setelah berkonsultasi dengan orang lain. Sebagian keputusan bersifat emosional dan sebagian lagi melalui pertimbangan yang matang. Semakin penting, keputusan yang akan dibuat, semakin berhati-hati dalam melalui tahapan untuk membuat keputusan. Kecuali bila bersifat reaksi emosional, keputusan itu biasanya melibatkan pemrosesan informasi, berbagai informasi dan dalam banyak kasus, persuasi karena manusia tidak hanya perlu memroses data, tetapi sering juga memperoleh dukungan atas keputusannya.

Sebenarnya banyak pendapat para pakar komunikasi yang dapat dikutip yang memaparkan fungsi komunikasi. Namun, kalau disimak, keseluruhan pendapat tersebut kembali kepada hakikat fungsi komunikasi, yakni membangun hubungan vertikal dan horisontal. Kendati jika ditakar lebih banyak pakar yang menitikberatkan komunikasi horisontal saja, yakni mengungkap hubungan manusia dengan manusia lainnya.

Terdapat tiga unsur pokok proses komunikasi, yakni pemberi pesan, pesan, dan penerima pesan. Dalam model komunikasi klasik dari Aristoteles, ketiga komponen itu ditegaskan dengan istilah *speaker, message, dan listener*.⁷

Shannon dan Weaver mengistilahkan ketiga unsur tersebut dengan *information source, message, dan receiver*. Sementara Schramm menyebutnya *encoder, message, decoder*. Kemudian Berlo menyebutnya *source, message, dan receiver*, serta istilah-istilah lainnya yang disodorkan oleh para ilmuwan komunikasi. Walaupun terdapat berbagai istilah yang digunakan, ketiga unsur tersebut menjadi sentral utama terjadinya proses komunikasi yang ditandai dengan interaksi simbolik antar pihak yang terlibat di dalamnya.⁸

Hal yang sama juga terjadi dalam komunikasi politik. Walaupun kebanyakan peneliti komunikasi politik menggunakan model Lasswell, tetap saja inti model tersebut terpusat dari ketiga unsur tersebut, walaupun dalam gambaran modelnya Lasswell tidak

⁶ Rudolph F. Verderber, *Communicate* (Belmont California: Wadsworth, 1990) h. 245

⁷ Syamsu Suryadi, *Elit Politik dalam Komunikasi Politik di Indonesia*, dalam Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun, *Indonesia dan Komunikasi Politik*, (Jakarta : Gramedia, 1993) h. 132-133

⁸ Denis Mc Quail, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, h. 137-138

menyebutkan secara eksplisit istilah komunikator, pesan dan komunikan. Lasswell mengungkapkan model komunikasinya secara verbal dengan lima pertanyaan: *who* (siapa sumbernya), *says what* (apa yang disampaikan), *in which channel* (melalui media apa), *to whom* (siapa sasaran), *with what effect* (apa pengaruhnya).

Komunikasi politik tidak bisa dilepaskan dari pandangan teori interaksi simbolik. Sebab dalam prosesnya pertukaran pesan dilakukan melalui berbagai atribut atau simbol-simbol dari masing-masing partai politik maupun aktor politik. Misalnya, pada saat kampanye simbol-simbol, bendera partai banyak menggunakan gambar/foto dari para aktor politik. Penggunaan simbol-simbol tersebut menurut Eep Saefullah Fattah adalah ingin terlihat menonjol. Di mana penonjolan semacam ini ternyata sangat bersifat simbolik sehingga teori interaksi simbolik sebagai pendekatan yang bermanfaat untuk menggali berbagai pengertian tentang kehidupan kelompok manusia dengan fokus sentralnya tentang interaksi dan komunikasi politik yang dilakukan untuk mempertukarkan pesan-pesan politik dalam pemilihan calon-calon politik tertentu.⁹

Teori interaksi simbolik pada dasarnya berada di bawah payung perspektif yang lebih besar, yaitu perspektif fenomenologis, di mana tokoh utamanya adalah George Herbert Mead. Dia mengungkapkan bahwa keseluruhan sosial mendahului pemikiran individu baik secara logika maupun secara temporer. Individu yang berpikir dan sadar diri adalah mustahil secara logika tanpa di dahului adanya kelompok sosial. Menurut Mead kelompok sosial muncul lebih dulu, dan kelompok sosial menghasilkan perkembangan keadaan mental kesadaran diri.¹⁰

Esensi dasar dari teori Mead adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Blumer mengintegrasikan gagasan-gagasan interaksi simbolik dengan John Dewey, William I. Thomas dan Charles H. Cooley. Gagasan mereka tersebut mengungkapkan bahwa kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol. Hal ini didasarkan pada tiga asumsi, yaitu: *Pertama*, individu merespons suatu situasi simbolik. Mereka merespon lingkungan, termasuk objek fisik (benda) dan objek sosial (perilaku manusia) berdasarkan makna yang dikandung komponen-komponen

⁹ Eep Saefullah Fatah, *Pengkhianatan Demokrasi ala Orde Baru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) h. 44

¹⁰ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prenada Media, 2007) h. 272-273

lingkungan tersebut bagi mereka. Ketika mereka menghadapi suatu situasi, respon mereka tidak bersifat mekanistik, tidak pula bergantung bagaimana eksternal; alih-alih, respons mereka bergantung pada bagaimana mereka mendefinisikan situasi yang dihadapi dalam interaksi sosial. Jadi, individu adalah yang dipandang aktif menentukan lingkungan mereka sendiri.

Kedua, makna adalah produk interaksi sosial, karena makna tidak melekat pada objek, melainkan dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa. Negosiasi itu dimungkinkan karena manusia mampu menamai segala sesuatu, bukan hanya objek fisik, tindakan atau peristiwa (bahkan tanpa kehadiran objek fisik, tindakan atau peristiwa itu), namun juga gagasan yang abstrak. Akan tetapi, nama atau simbol yang digunakan untuk menandai objek, tindakan, peristiwa, dan gagasan itu bersifat arbitrer (sembarang). Artinya, logis antara nama atau simbol dengan objek yang dirujuknya meskipun kita terkadang sulit untuk memisahkan kedua hal itu. Melalui penggunaan simbol itulah manusia dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang dunia.

Ketiga, makna yang diinterpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial. Perubahan interpretasi dimungkinkan karena individu dapat melakukan proses mental, yakni berkomunikasi dengan dirinya. Manusia membayangkan atau merencanakan apa yang akan mereka lakukan. Dalam proses ini, individu mengantisipasi reaksi orang lain, mencari alternatif-alternatif ucapan atau tindakan yang akan ia lakukan. Individu membayangkan bagaimana orang lain akan merespons ucapan atau tindakan mereka. Proses pengambilan-peran tertutup (*covert role-taking*) itu penting, meskipun hal itu tidak teramati. Karena itu, kaum interaksionis simbolik mengakui adanya tindakan tertutup dan tindakan terbuka, menganggap tindakan terbuka sebagai kelanjutan dari tindakan tertutup.¹¹

Ketiga asumsi tersebut di atas, disimpulkan Blumer dalam tiga premis, yaitu: (a) manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu, (b) makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain, dan (c) makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung. Seperti yang ditegaskan Blumer, maka perspektif interaksi simbolik berusaha memahami

¹¹ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. (Bandung: Remaja. Rosdakarya, 2002) h. 68-73

perilaku manusia dari sudut pandang subjek.¹²

Persepektif interaksi simbolik menurut Besker menyarankan bahwa perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksi mereka. Defenisi yang mereka berikan kepada orang lain, situasi, objek dan bahkan diri sendiri ditentukan oleh perilaku mereka sendiri. Karena itu menurut Johannes manusia bertindak hanya berdasarkan defenisi atau penafsiran mereka atas objek-objek di sekeliling mereka, dan tidak digolongkan sebagai kebutuhan dan dorongan impuls (hati), tuntutan budaya, atau tuntutan peran. Bagi Blumer proses sosial dalam kehidupan kelompoklah yang menciptakan dan menengakkan aturan-aturan, bukan aturan-aturan yang menciptakan dan menegakan kehidupan kelompok. Dalam konteks ini, makna dikonstruksikan dalam proses interaksi, dan proses tersebut bukanlah suatu medium netral yang memungkinkan kekuatan-kekuatan sosial memainkan peranannya, melainkan justru merupakan substansi sebenarnya dari organisasi sosial dan kekuatan sosial.¹³

Berkaitan dengan teori interaksi simbolik ini, maka Ritzer meringkas teori ini kedalam prinsip-prinsip, sebagai berikut:

1. Manusia, tidak seperti hewan lebih rendah, diberkahi dengan kemampuan berpikir.
2. Kemampuan berpikir itu dibentuk oleh interaksi sosial.
3. Dalam interaksi sosial orang belajar makna dan simbol yang memungkinkan mereka menerapkan kemampuan khas mereka sebagai manusia, yakni berpikir.
4. Makna dan simbol memungkinkan orang melanjutkan tindakan (*action*) dan interaksi yang khas manusia.
5. Orang mampu memodifikasi atau mengubah makna dan simbol yang mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan interpretasi mereka atas situasi.
6. Orang mampu melakukan modifikasi dan perubahan ini karena, antara lain kemampuan mereka berinteraksi dengan diri sendiri, yang memungkinkan mereka memeriksa tahapan-tahapan tindakan, menilai keuntungan dan kerugian relatif, dan kemudian memilih salah satunya.
7. Pola-pola tindakan dan interaksi yang jalin-menjalin ini membentuk kelompok dan

¹² Engkus Kuswarno, *Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi: Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya* (Bandung: Widya Padjajaran, 2009) h. 113

¹³ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, h. 70

masyarakat.¹⁴

Berdasarkan ketiga premis dan ringkasan teori di atas, menurut Engkus Kuswarno terdapat esensi bahwa komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna merupakan suatu aktivitas yang khas di antara manusia. Selain itu seseorang akan menjadi manusiawi hanya melalui interaksi dengan sesamanya, di mana interaksi yang terjadi antara manusia akan membentuk masyarakat. Karena manusia secara aktif membentuk perilakunya sendiri. Kesadaran dan pikiran melibatkan interaksi manusia dengan dirinya sendiri.¹⁵

Berkaitan dengan kemampuan manusia untuk dapat merespon simbol- simbol di antara mereka berinteraksi, menurut Mead membawa penjelasan interaksi simbolik kepada konsep tentang diri (*self*). Apa yang menjadi penekanan dalam teori ini sangat relevan dengan penelitian ini. Karena konsep Mead tentang diri yang lebih menekankan pada konsep “pengambilan peran orang lain” (*taking the role of the other*), atau penjabaran “diri sosial” (*social self*) adalah dilakukan melalui makna yang dikonstruksikan secara sosial.¹⁶

Dengan demikian, maka konsep diri sebagai suatu proses yang berasal dari interaksi sosial individu dengan orang lain dapat diterapkan dalam proses komunikasi politik antaraktor politik, atau di luar aktor politik. Di samping konsep diri ini, juga interaksi sosial individu melalui makna maupun simbol-simbol komunikasi baik simbol verbal maupun non verbal.

C. KOMUNIKASI POLITIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF ILMU POLITIK

Istilah politik menurut Sumarno berasal dari kata “*polis*” yang berarti negara, kota, yaitu secara totalitas merupakan kesatuan antara negara (kota) dan masyarakatnya. Kata “*polis*” ini berkembang menjadi “*politicos*” yang artinya kewarganegaraan. Dari kata “*politicos*” menjadi “*politera*” yang berarti hak-hak kewarganegaraan.¹⁷

Sementara itu menurut Dan Nimmo mengartikan politik sebagai kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Dalam berbagai hal orang berbeda satu sama lain – jasmani, bakat, emosi, kebutuhan, cita-cita, inisiatif, perilaku, dan sebagainya. Lebih lanjut Nimmo menjelaskan, kadang-kadang

¹⁴ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, h. 73

¹⁵ Engkus Kuswarno, *Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi: Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya*, h. 114.

¹⁶ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, h. 73

¹⁷ A. P. Sumarno, *Dimensi - dimensi Komunikasi Politik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989) h. 8

perbedaan ini merangsang argumen, perselisihan, dan percekocokan. Jika mereka menganggap perselisihan itu serius, perhatian mereka dengan memperkenalkan masalah yang bertentangan itu, dan selesaikan; inilah kegiatan politik.¹⁸

Dalam pandangan Harold Lasswell, ilmu politik adalah ilmu tentang kekuasaan.¹⁹ Sedangkan David Easton mendefinisikan politik sebagai berikut: *Political as a process those developmental processes through which person acquire political orientation and patterns of behavior*”.²⁰ Dalam definisi ini David Easton menitikberatkan bahwa politik itu sebagai suatu proses di mana dalam perkembangan proses tersebut seseorang menerima orientasi politik tertentu dan pola tingkah laku.

Dari beberapa definisi di atas dapat dikatakan bahwa ilmu politik secara umum berarti ilmu tentang kekuasaan, di mana di dalamnya terdapat kuasa untuk mengatur masyarakat, menyelesaikan konflik sosial yang timbul dalam masyarakat yang memiliki perbedaan orientasi politik. Semua hal yang berkaitan dengan kekuasaan politik hanya bisa berjalan dengan adanya komunikasi politik.

Komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini, dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik.²¹ Mengenai komunikasi politik ini (*political communication*) Rusandi Kantaprawira memfokuskan pada kegunaannya, yaitu untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah.²²

Dengan demikian segala pola pemikiran, ide atau upaya untuk mencapai pengaruh, hanya dengan komunikasi dapat tercapainya segala sesuatu yang diharapkan, karena pada hakikatnya segala pikiran atau ide dan kebijakan (*policy*) harus ada yang menyampaikan dan ada yang menerimanya, proses tersebut adalah proses komunikasi.

Dilihat dari tujuan politik “an sich”, maka hakikat komunikasi politik adalah upaya kelompok manusia yang mempunyai orientasi pemikiran politik atau ideologi tertentu

¹⁸ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan Media* (Bandung: Remadja

¹⁹ S.P. Varma, *Teori Politik Modern*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995) h. 258

²⁰ A. P. Sumarno, *Dimensi - dimensi Komunikasi Politik*, h. 8

²¹ Astrid S. Soesanto, *Komunikasi Sosial di Indonesia*. (Jakarta: Bina Cipta, 1980) h. 2

²² Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik di Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1983) h. 25

dalam rangka menguasai dan atau memperoleh kekuasaan, dengan kekuatan mana tujuan pemikiran politik dan ideology tersebut dapat diwujudkan.

Harold Lasswell memandang orientasi komunikasi politik telah menjadikan dua hal sangat jelas: *pertama*, bahwa komunikasi politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan; nilai-nilai dan tujuan itu sendiri dibentuk di dalam dan oleh proses perilaku yang sesungguhnya merupakan suatu bagian; dan *kedua*, bahwa komunikasi politik bertujuan menjangkau masa depan dan bersifat mengantisipasi serta berhubungan dengan masa lampau dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu.²³

Dalam hal ini, R.S. Sigel memberikan pandangan sebagai berikut: *“Political socialization refers to the learning process, by which the political norms and behavior acceptable to an ongoing political system are transmitted from generation to generation”*.²⁴ Dari batasan Sigel ini menunjukkan bahwa sosialisasi politik bukan hanya menitikberatkan pada penerimaan norma-norma politik dan tingkah laku pada sistem politik yang sedang berlangsung, tapi juga bagaimana merwariskan atau mengalihkan nilai-nilai dari suatu generasi kenegaraan berikutnya.

Komunikasi politik menuntut keberadaan komunikator politik sebagai ujung tombak yang membawa misi politik dalam berbagai medium komunikasi. Menurut Nimmo, salah satu ciri komunikasi ialah bahwa orang jarang dapat menghindari dan keturutsertaan. Hanya dihadiri dan diperhitungkan oleh seorang lain pun memiliki nilai pesan. Dalam arti yang paling umum kita semua adalah komunikator, begitu pula siapa pun yang dalam setting politik adalah komunikator politik.²⁵ Meskipun mengakui bahwa setiap orang boleh berkomunikasi tentang politik, kita mengakui bahwa relatif sedikit yang berbuat demikian, setidaknya- tidaknya yang melakukannya serta tetap dan sinambung. Mereka yang relatif sedikit ini tidak hanya bertukar pesan politik; mereka adalah pemimpin dalam proses opini. Para komunikator politik ini, dibandingkan dengan warga negara pada umumnya, ditanggapi dengan lebih bersungguh-sungguh bila mereka berbicara dan berbuat.

Sebagai pendukung pengertian yang lebih besar terhadap peran komunikator politik

²³ Harsono Suwardi, “Komunikasi Politik dan Kredibilitas Media Menjelang Jatuhnya Soeharto”, dalam Dedy H. Hidayat, dkk (Ed.) *Pers dalam Revolusi Mei: Runtuhnya Sebuah Hegemoni* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000) h. 328

²⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992) h. 192

²⁵ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan Media*, h.28

dalam proses opini, Leonard W. Dood menyarankan jenis-jenis hal yang patut diketahui mengenai mereka: "Komunikator dapat dianalisis sebagai dirinya sendiri. Sikapnya terhadap khalayak potensialnya, martabat yang diberikannya kepada mereka sebagai manusia, dapat mempengaruhi komunikasi yang dihasilkannya; jadi jika ia mengira mereka itu bodoh, ia akan menyesuaikan nada pesannya dengan tingkat yang sama rendahnya. Ia sendiri memiliki kemampuan- kemampuan tertentu yang dapat dikonseptualkan sesuai dengan kemampuan akalinya, pengalamannya sebagai komunikator dengan khalayak yang serupa atau yang tak serupa, dan peran yang dimainkan di dalam kepribadiannya oleh motif untuk berkomunikasi."²⁶

Berdasar pada anjuran Doob, jelas bahwa komunikator atau para komunikator harus diidentifikasi dan kedudukan mereka di dalam masyarakat harus ditetapkan. Untuk keperluan ini Nimmo mengidentifikasi tiga kategori politikus, yaitu yang bertindak sebagai komunikator politik, komunikator profesional dalam politik, dan aktivis atau komunikator paruh waktu (*part time*).²⁷

Kelompok pertama ini adalah orang yang bercita-cita untuk memegang jabatan pemerintah dan memegang pemerintah yang harus berkomunikasi tentang politik dan disebut dengan politikus, tak peduli apakah mereka dipilih, ditunjuk, atau jabatan karier, baik jabatan eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Pekerjaan mereka adalah aspek aspek utama dalam kegiatan ini. Meskipun politikus melayani beraneka tujuan dengan berkomunikasi, ada dua hal yang menonjol. Daniel Katz menunjukkan bahwa pemimpin politik mengarahkan pengaruhnya ke dua arah, yaitu mempengaruhi alokasi ganjaran dan mengubah struktur sosial yang ada atau mencegah perubahan demikian.²⁸

Dalam kewenangannya yang pertama politikus itu berkomunikasi sebagai wakil suatu kelompok; pesan-pesan politikus itu mengajukan dan melindungi tujuan kepentingan politik, artinya komunikator politik mewakili kepentingan kelompoknya. Sebaliknya, politikus yang bertindak sebagai ideologi tidak begitu terpusat perhatiannya kepada mendesak tuntutan kelompoknya, ia lebih menyibukkan diri untuk menetapkan tujuan kebijakan yang lebih luas, mengusahakan reformasi dan bahkan mendukung perubahan revolusioner.

²⁶ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan Media*, h.30

²⁷ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan Media*, h.30

²⁸ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan Media*, h.30

Termasuk dalam kelompok ini, politikus yang tidak memegang jabatan dalam pemerintah, mereka juga komunikator politik mengenai masalah yang lingkungannya nasional dan internasional, masalah yang jangkauannya berganda dan sempit.

Jadi banyak jenis politikus yang bertindak sebagai komunikator politik, namun untuk mudahnya diklasifikasikan mereka sebagai politikus (1) berada di dalam atau di luar jabatan pemerintah, (2) berpandangan nasional atau sub nasional, dan (3) berurusan dengan masalah berganda atau masalah tunggal.²⁹

Komunikator profesional adalah peranan sosial yang relatif baru, suatu hasil sampingan dari revolusi komunikasi yang sedikitnya mempunyai dua dimensi utama: munculnya media massa yang melintasi batas-batas rasial, etnis, pekerjaan, wilayah, dan kelas untuk meningkatkan kesadaran identitas nasional; dan perkembangan serta-merta media khusus yang menciptakan publik baru untuk menjadi konsumen informasi dan hiburan.³⁰

Seorang komunikator profesional, menurut James Carey adalah seorang makelar simbol, orang yang menerjemahkan sikap, pengetahuan, dan minat suatu komunitas bahasa ke dalam istilah-istilah komunitas bahasa yang lain dan berbeda tetapi menarik dan dapat dimengerti. Komunikator profesional menghubungkan golongan elit dalam organisasi atau komunitas mana pun dengan khalayak umum; secara horizontal ia menghubungkan dua komunitas bahasa yang dibedakan pada tingkat struktur sosial yang sama. Bagaimanapun, karena menjadi komunikator profesional, bukan politikus, profesional yang berkomunikasi menempatkan dirinya terpisah dari tipe-tipe komunikator politik yang lain, terutama aktivis politik.³¹

Dari pembahasan di atas tampak bahwa kolaborasi komunikasi politik dan komunikator politik, baik itu oleh politisi maupun profesional, adalah akumulasi dari upaya pencapaian tujuan politik yakni kekuasaan. Bagaimana komunikasi politik itu sangat dipengaruhi oleh sistem politik dan pemerintahan yang berlaku di suatu tempat. Dalam pemerintahan yang demokratis, komunikasi politik dapat berjalan secara wajar dan sehat sebagaimana seharusnya. Sebaliknya dalam pemerintahan yang otoriter, komunikasi politik akan berlangsung tidak sehat karena cenderung hanya satu arah yang didominasi

²⁹ Rochajat Harun, *Komunikasi Politik, Suatu Pengantar* (Jakarta: Mandarmaju, 2006) h. 142

³⁰ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan Media*, h.33

³¹ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan Media*, h.33

oleh penguasa. Meskipun demikian, dari perspektif ilmu politik, komunikasi politik dalam sistem apapun dia eksis, tetap sebagai instrumen yang digunakan untuk meraih kekuasaan dalam berbagai dimensinya.

D. KOMUNIKASI POLITIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF KOMUNIKASI ISLAM

Komunikasi politik selain dapat dianalisis dari perspektif ilmu komunikasi dan ilmu politik, juga dapat dianalisis melalui perspektif komunikasi Islam. Komunikasi Islam itu sendiri dalam pandangan Harjani Hefni adalah komunikasi yang dibangun di atas prinsip-prinsip Islam yang memiliki roh kedamaian, keramahan dan keselamatan. Dengan asas Al-Qur'an dan Sunnah, komunikasi Islam adalah komunikasi yang berupaya membangun hubungan dengan diri sendiri, dengan Sang Pencipta serta dengan sesama untuk menghadirkan kedamaian, keramahan, dan keselamatan buat diri dan lingkungan dengan cara tunduk dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.³²

Berdasarkan terminologi di atas dapat dipahami bahwa komunikasi Islam tidak semata sebagai sebuah praktek komunikasi yang bertujuan untuk berkirim pesan dengan tujuan terbangunnya suatu pandangan yang sama tentang obyek yang dikomunikasikan, namun lebih dari itu, komunikasi Islam berupaya membangun sebuah komunikasi yang berkarakter yang diwarnai dengan nilai-nilai Islam dalam rangka membangun kedamaian, keramahan dan komunikasi harmonis dengan sesama.

Islam sebagai sebuah agama, ajarannya mencakup semua aspek kehidupan termasuk juga urusan politik. Islam adalah agama yang tidak bisa dipisahkan dari politik, karena politik itu berkaitan dengan hajat hidup umat manusia dari hingga kini termasuk juga umat Islam. Nabi Muhammad saw juga adalah seorang politisi yang memimpin negara Madinah, dan dalam konteks beliau sebagai kepala negara, Nabi Muhammad saw juga melakukan praktek komunikasi politik, baik secara verbal maupun menggunakan media, hal ini sebagaimana yang dipraktekkan dalam mengirim surat kepada raja-raja di sekitar Madinah dengan tujuan untuk mengajak mereka masuk Islam.³³

Dalam kehidupan politik umat Islam di Indonesia, praktek komunikasi politik dapat ditemukan dalam aktivitas politik para tokoh politik Islam yang berasal dari berbagai latar

³²Harjani Hefni, *Komunikasi Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) h. 14

³³Ubaidillah, *Surat-surat Nabi Muhammad saw Kepada Para Raja (Analisis Wacana Model Van Dijk)* Disertasi Doktor Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2015, h. 11

belakang sosial politiknya. Aktor politik Islam bisa jadi adalah orang Islam yang sejak awal merupakan politisi murni. Atau bisa juga adalah tokoh agama yang kemudian terjun ke dunia politik, misalnya kiai. Dalam posisinya sebagai aktor politik, seorang kiai sudah pasti akan melakukan kegiatan komunikasi politik. Komunikasi politik kiai tidak bisa dilepaskan dari perspektif Islam. Hal ini dikarenakan semua aspek kehidupan kiai tidak bisa dilepaskan dari doktrin-doktrin ajaran Islam yang dilakukan sehari-hari.³⁴

Ajaran Islam memang sangat menekankan komunikasi yang beradab termasuk juga dalam komunikasi politik. Al-Qur'an memberikan alternatif komunikasi yang menyentuh jiwa misalnya dengan model komunikasi *qawlan layyinan*. Model komunikasi ini menekankan pada pembicaraan yang lemah lembut, dengan suara yang enak didengar, dan penuh keramahan sehingga dapat menyentuh hati. Dengan *qawlan layyinan* hati komunikan akan tersentuh dan jiwanya tergerak untuk menerima pesan komunikasi. Dengan demikian, dalam komunikasi Islam semaksimal mungkin dihindari kata-kata yang kasar dan intonasi suara yang bernada tinggi dan keras.³⁵

Atas dasar prinsip di atas maka komunikasi politik yang dibangun oleh seorang kiai akan memiliki kecenderungan pada komunikasi yang beretika atau komunikasi yang memiliki ciri akhlakul karimah. Komunikasi politik yang dibangun adalah sebuah komunikasi yang bertujuan untuk menjalin hubungan sesama manusia dan ditujukan untuk mencapai kemaslahatan hidup secara kolektif melalui jalur politik.

Akhlakul karimah menjadi karakteristik yang khas dari komunikasi Islam hal ini dikarenakan komunikasi Islam harus memiliki kaitan yang erat dengan sumber ajaran Islam yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Komunikasi Islam menekankan konten komunikasi dan metode komunikasinya haruslah diwarnai oleh perintah agama. Artinya komunikasi yang beretika harus memiliki nilai-nilai etika yang tinggi dalam menyampaikan pesan, tidak menggunakan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan komunikan atau khalayak.³⁶

Dengan penekanan pada etika dalam berkomunikasi, maka komunikasi Islam akan memberikan perpektif yang lebih baik bagi komunikasi politik. Komunikasi politik

³⁴Ihwan Huda Al-Mujib, *Perspektif Islam dalam Komunikasi Politik Kyai* (Studi Etnografi Pengasuh Pondok Pesantren Annuriyyah Jember Jawa Timur dalam Jurnal Nomosleca Volume 6 Nomor 1 2020, h.69

³⁵Hery Purwosusanto, *Komunikasi Politik dalam Tafsir* (Kajian Atas Tafhim Al-Qur'an Karya Abul A'la Al-Maududi) dalam Jurnal Tajdid Volume XV Nomor 2 2016, h. 67

³⁶Abdul Rasid, *Konseptualisasi Etika Dalam Politik Perspektif Komunikasi Islami* dalam Jurnal Ilmu Dakwah Volume 5 Nomor 2 2011, h. 648-649

meskipun ditujukan untuk sebanyak mungkin meraih keuntungan politik, namun bila dibangun dengan asas komunikasi Islam akan terhindar dari praktek komunikasi politik yang bertendensi menyerang, saling menjatuhkan dan jauh dari nilai-nilai etika. Kolaborasi antara komunikasi politik dan komunikasi Islam akan melahirkan praktek komunikasi politik yang santun yang akan berimplikasi pada praktek politik yang ramah sehingga keputusan-keputusan politik yang dilahirkan merupakan keputusan politik yang dinantikan khalayak karena akan merupakan jawaban atas berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan.

E. PENUTUP

Komunikasi politik dalam perspektif ilmu komunikasi dapat dilihat dari dua aspek yakni aspek komunikasi mekanistik yang bertumpu pada teori Lasswell yakni komunikator menyampaikan pesan kepada khalayak tertentu melalui suatu media dengan efek tertentu. Dalam konteks politik, komunikator, pesan, dan efek, semuanya bertendensi politik. Aspek yang kedua adalah interaksi simbolik yang bersandar pada teori George Herbert Mead. Berdasarkan pandangan ini maka setiap politisi atau kelompok politik akan mengedepankan suatu atribut khas sebagai simbol identitas dirinya dalam sebuah proses komunikasi politif.

Komunikasi politik dalam perspektif ilmu politik adalah wahana yang bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan politik yang tujuan akhirnya adalah pencapaian kekuasaan dalam berbagai dimensinya. Dari perspektif ilmu politik, komunikasi politik bisa diperankan oleh politisi yang memiliki tujuan untuk meraih kekuasaan tertentu, atau bisa juga diperankan oleh profesional di mana dia dengan keahliannya menghubungkan kepentingan politik dengan khalayak sasarnya.

Komunikasi politik dalam perspektif komunikasi Islam menekankan pada praktek komunikasi politik yang beretika. Model komunikasi ini dibangun berdasarkan teori Hefni yang menyatakan bahwa komunikasi Islam adalah komunikasi yang dibangun di atas prinsip Islam yang memiliki ruh kedamaian, keramahan dan keselamatan. Dengan landasan ini, maka model komunikasi politik yang terbangun adalah komunikasi politik yang beretika yang jauh dari praktek komunikasi politik yang saling serang dan saling menjatuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatah, Eep Saefullah, *Pengkhianatan Demokrasi ala Orde Baru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000)
- Gorden, William J., *Communication: Personal and Public* (Sherman Oaks California: Alfred, 1989)
- Harun, Rochajat, *Komunikasi Politik, Suatu Pengantar* (Jakarta: Mandarmaju, 2006)
- Hefni, Harjani, *Komunikasi Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Kantaprawira, Rusadi, *Sistem Politik di Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1983) Kuswarno, Engkus, *Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi: Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya* (Bandung: Widya Padjajaran, 2009)
- Mc Quail, Denis, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar* (Jakarta: Erlangga; 1994)
- Al-Mujib, Ihwan Huda, *Perspektif Islam dalam Komunikasi Politik Kyai* (Studi Etnografi Pengasuh Pondok Pesantren Annuriyyah Jember Jawa Timur dalam Jurnal Nomosleca Volume 6 Nomor 1 2020)
- Mulyana, Deddy, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. (Bandung: Remaja. Rosdakarya, 2002)
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1985)
- Nimmo, Dan, *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan Media* (Bandung: Remadja Rosdakarya, 2000)
- Purwosusanto, Hery, *Komunikasi Politik dalam Tafsir* (Kajian Atas Tafhim Al-Qur'an Karya Abul A'la Al-Maududi) dalam Jurnal Tajdid Volume XV Nomor 2 2016
- Abdul Rasid, *Konseptualisasi Etika Dalam Politik Perspektif Komunikasi Islami* dalam Jurnal Ilmu Dakwah Volume 5 Nomor 2 2011
- Ritzer, George, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prenada Media, 2007)
- Rosyada, Dede, et.al., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003)
- Sumarno, A. P. , *Dimensi - dimensi Komunikasi Politik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989)
- S. Soesanto, Astrid, *Komunikasi Sosial di Indonesia*. (Jakarta: Bina Cipta, 1980) Suwardi, Harsono, “*Komunikasi Politik dan Kredibilitas Media Menjelang Jatuhnya Soeharto*”, dalam Dedy H. Hidayat, dkk (Ed.) *Pers dalam Revolusi Mei: Runtuhnya Sebuah Hegemoni* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000)
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992)
- Suryadi, Syamsu, *Elit Politik dalam Komunikasi Politik di Indonesia*, dalam Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun , *Indonesia dan Komunikasi Politik*, (Jakarta : Gramedia, 1993)
- Ubaidillah, *Surat-surat Nabi Muhammad saw Kepada Para Raja (Analisis Wacana Model Van Dijk)* Disertasi Doktor Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2015
- Varma, S.P., *Teori Politik Modern*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995)
- Verderber, Rudolph F. *Communicate* (Belmont California: Wadsworth, 1990)